



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
SUB UNIT KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS I JAKARTA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOPIE ASMARA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR IMIGRASI
3. NHK : 690693

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 602.000.000

1. MOTOR, ___ SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 383.036.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.485.036.000**III. HUTANG** Rp. 2.376.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.109.036.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.